

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Namun, pertumbuhan ekonomi juga bisa berdampak negatif bagi alam, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Tidak hanya aktivitas ekonomi saja yang mengalami peningkatan, kebutuhan hidup masyarakat seperti konsumsi rumah tangga pun mengalami peningkatan seiring meningkatnya pendapatan mereka yang kemudian menyebabkan peningkatan sampah rumah tangga.

Menurut Indramawan (2014), Pembangunan ekonomi berjalan hampir beriringan dengan menurunnya daya tahan dan fungsi lingkungan hidup. Pembangunan yang terlalu berorientasi dalam mengejar pertumbuhan seringkali mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada akhirnya justru menjadi perusak sistem penunjang kehidupan lingkungan hidup. Sampah saat ini telah menjadi masalah yang serius dihadapi beberapa wilayah perkotaan dan belum mendapat jalan keluarnya. Pencemaran lingkungan memang tidak dapat dihindari, namun yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kepada lingkungannya. Lahirnya UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu menjawab tantangan kedepan tentang permasalahan lingkungan termasuk masalah penyebab sampah, untuk itu perlu dibuat aturan

tentang pengolahan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 bahwa :

” Pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik”.

Dalam pengelolaan sampah yang tepat akan mengurangi kerusakan lingkungan dan dapat bermanfaat karena adanya keuntungan bagi masyarakat. Sebagaimana ada dalam Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, yaitu dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 77:

نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

” Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan ”

Menurut Chandra (2006) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sistem pengolahan sampah kota merupakan salah satu aspek direncana pengembangan prasarana pengolahan lingkungan, dasar sistem pengolahan satu kawasan adalah tata cara tehnik oprasional pengolahan sampah di perkotaan atau pemukiman, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap

pengelola persampahan yang salah satunya adalah partisipasi masyarakat (Susanto, 2016). Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang kurang lebih 60% dari seluruh produksi sampahnya, dari 60% ini sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari (Daniel, Hasan & Vonny, 1985). Menurut Standar Sistem Persampahan Indonesia edisi 1997 yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, sistem pengangkutan sampah mendominasi 50% dari totalitas biaya persampahan. Sementara sistem pengumpulan mendominasi sebesar 10%, serta sistem pemusnahan akhir dengan teknologi lahan urug saniter sebesar 40%.

Dengan kata lain, peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pengangkutan sampah, dapat secara signifikan mereduksi biaya total persampahan, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi. Menurut Tansatrisna (2014), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung, yaitu partisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait yang secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada hasil survei timbulan sampah yang dilakukan oleh BLH Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, rata-rata timbulan sampah dari perorangan di Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sebanyak 0,44 kg/orang/hari. Seiring bertambahnya populasi penduduk di suatu lingkungan maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi di lingkungan tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik. Sampah merupakan masalah yang umum yang ada di suatu lingkungan, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah yang membawahi daerah tersebut. Hal ini juga dirasakan bagi pemerintah Bantul.

Kabupaten Bantul memiliki luas 50.685 Ha, terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh pertumbuhan alami dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bantul sebesar 1,57%. Volume sampah di Kabupaten Bantul mencapai 2.190,43 m³ perhari, sedangkan volume sampah yang terangkut 131,37 m³ atau 6% dari total volume sampah. Tidak semua sampah diproses ke tempat pengolahan akhir (TPA). Masih ada pengelolaan sampah yang dilakukan secara individu dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai. Sosialisasi pengelolaan sampah dengan konsep 3R oleh komunitas masyarakat ditindaklanjuti dengan dibentuknya Bank Sampah di dusun Badegan, Kelurahan Bantul pada tahun 2009.

Penampungan sampah disediakan secara mandiri oleh komunitas masyarakat, kecuali di trotoar yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Pengumpulan sampah dilakukan secara individu maupun komunal yang dikelola oleh petugas RT/RW. Sistem pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke TPS diangkut dengan gerobak. Dari TPS sampah diangkut

dengan truk sampah ke TPA Piyungan. Untuk daerah yang berlokasi di jalan protokol, kawasan komersial dan perkantoran, sampah langsung diangkut ke TPA. Kabupaten Bantul memiliki kendaraan pengangkut sampah (dump truck) 15 buah, armrool truck 4 buah dan pickup L-300 1 buah dalam kondisi baik. Sistem layanan sampah terpusat yang cukup besar pada kecamatan-kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan meliputi Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon dan Kasihan. Sedangkan di 12 kecamatan lainnya, jumlah volume sampah terangkut lebih kecil dan berasal dari TPS pasar. Dari seluruh kecamatan, hanya Kecamatan Dlingo yang belum terlayani (Bappeda Kab.Bantul, 2014).

TABEL 1. 1

Volume Sampah dan Sampah Terangkut per Hari di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah TPS & container	Jumlah Ritasi Truk Sampah	Volume Sampah perhari (m ³)	Volume Sampah Terangkut perhari (m ³)	Vol.Sampah Tidak Terangkut perhari (m ³)
1	Srandakan	1	1	78,59	1,00	77,59
2	Sanden	2	1	91,14	2,05	89,08
3	Kretek	3	1	80,69	5,35	75,34
4	Pundong	2	1	82,36	1,35	81,01
5	Bambanglipiro	5	1	111,97	3,71	108,26
6	Pandak	3	1	128,66	1,60	127,06
7	Bantul		1	155,51	33,09	122,42
8	Jetis	4	1	130,09	1,48	129,08
9	Imogiri	2	1	154,17	6,25	147,92
10	Dlingo	-		105,67	-	105,67
11	Pleret	3	1	105,2	1,20	104,12
12	Piyungan	4	1	103,46	4,50	98,96
13	Banguntapan	8	1	227,36	30,06	197,26
14	Sewon	26	1	203,92	17,70	186,22
15	Kasihan	14	1	230,58	14,88	215,69
16	Pajangan	5	1	83,10	3,34	79,76
17	Sedayu	6	1	117,43	3,79	113,64
	Jumlah	111	16	2.190,43	131,37	2.059,06
				Persentase	6,00%	94%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, 2011

Tabel 1.1 menunjukkan data volume sampah terangkut terbesar di Kecamatan Bantul, Kasihan, Banguntapan, dan Sewon karena 4 kecamatan tersebut merupakan kawasan perkotaan. Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Bantul menggunakan standar 2-3 liter sampah tiap orang dalam sehari. Sampah di Kabupaten Bantul, baik sampah organik maupun sampah anorganik serta sampah B3, dibuang ke TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan. TPA Piyungan mulai dioperasikan tahun 1995, memiliki luas 12 hektar dan kapasitas 2,7 juta m³ sampah. Masa pemakaian diperkirakan 10 tahun dengan asumsi persentase daur ulang 20%. Apabila persentase daur ulang mencapai 50%, maka masa pemakaian bisa mencapai 13 tahun. TPA Piyungan merupakan lokasi akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga dari tiga kawasan perkotaan, yakni dari Kota Yogyakarta, kawasan perkotaan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. TPA Piyungan dalam sehari menerima sekitar 350 ton sampah. TPA Piyungan dikelola melalui Sekretariat Bersama Yogyakarta – Sleman – Bantul (Sekberkartamantul) yang memfasilitasi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam berkoordinasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan.

Kasihani merupakan salah satu kecamatan yang memiliki volume sampah terbesar di Kabupaten Bantul. Salah satu desa di Kecamatan Kasihan yaitu Desa Bangunjiwo. Dimana area pemukiman masyarakat biasanya tidak terdapat pembuangan sampah khusus, sehingga masih melakukan dengan cara mengumpulkan sampah di halaman atau diangkut ke ladang yang kemudian ada yang dibakar, dibuang ke sungai dan ada yang dibiarkan membusuk di perkarangan rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk menangani permasalahan sampah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kendala terpenting dalam menangani permasalahan sampah. Jika pengelolaan sampah di permukiman kumuh belum teratasi maka akan menjadi masalah yang lebih buruk untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, beban biaya pemerintah dalam mengelola sampah akan semakin tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya menerapkan wawasan lingkungan mengenai pengelolaan sampah misalnya dengan membentuk swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti membentuk bank sampah sehingga masyarakat dapat mengelola sampah tersebut menjadi nilai ekonomis. Peran pemerintah dalam hal ini menjadi pembina dan pemberi modal para kelompok swadaya masyarakat. Akan tetapi, dalam menciptakan kelompok swadaya masyarakat tidak membutuhkan biaya yang sedikit sehingga membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat. Kerjasama ini dapat dimulai dengan kesediaan masyarakat dengan menyisihkan sedikit pendapatannya untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah. Jika masyarakat ingin kembali ke lingkungan yang sehat, maka masyarakat akan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Chalid dan Iyan (2015) dan juga penelitian dari Emalia dan Huntari (2016) bahwa masyarakat setempat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pekerjaan dan kepedulian dengan lingkungan tempat mereka tinggal sehingga mereka bersedia membayar untuk pengolahan sampah.

Kesediaan membayar (*willingness to pay*) masyarakat diartikan sejumlah uang yang ingin diberikan oleh masyarakat untuk memperoleh suatu peningkatan kondisi lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan mencari nilai *willingness to pay* (WTP) masyarakat dan mengetahui bagaimana faktor usia, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, pekerjaan dan karakteristik permukiman kumuh mempengaruhi kesediaan membayar masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan dalam pengelolaan sampah di kecamatan kasihan Desa Bangunjiwo. Rumah tangga di area perumahan setiap harinya akan menghasilkan sampah, terus bertambahnya volume sampah maka sangat diperlukan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang berada di perumahan biasanya waktunya lebih banyak digunakan untuk urusan pekerjaan, sehingga diperlukan jasa pengangkutan sampah dalam membantu menyelesaikan urusan sampah rumah tangga. Peran dari jasa pengangkutan

sampah ini menjadi penting dan membuat kesediaan masyarakat dalam membayar jasa dari pengangkut sampah. Metode pengelolaan sampah yang sederhana yaitu kumpul, angkut dan buang ini membuat peran dari jasa pengangkut sampah menjadi factor keberhasilan dalam pengelolaan sampah yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Hagos dkk (2009), Alnaa dkk (2011), Setiyawan (2014), Anissa dkk (2015) menunjukkan bahwa WTP berpengaruh negative terhadap usia. WTP berpengaruh positif terhadap pendapatan (Dhanalakshmi (2015), Ferry Setiawan dan Endah Saptutyingsih (2022), Hagos dkk (2009), Ruban dkk (2014), Djayasinga dan Virsa (2019), Alnaa dkk (2011), Indramawan (2014), Setiyawan (2014), Anissa dkk (2015)). Penelitian yang dilakukan oleh Dhanalakshmi (2015), Djayasinga dan Virsa (2019), Alnaa dkk (2011), Indramawan (2014), Anissa dkk (2015), WTP berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. WTP berpengaruh positif terhadap jumlah anggota keluarga (Dhanalakshmi (2015), Ferry Setiawan dan Endah Saptutyingsih (2022), Hagos dkk (2009), Indramawan (2014)). WTP berpengaruh positif terhadap pekerjaan (Alnaa dkk (2011), Indramawan (2014)), dan persepsi (Dhanalakshmi (2015)). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang variabel apa saja yang mempengaruhi kesediaan membayar pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *WILLINGNESS TO PAY* MASYARAKAT TERHADAP JASA PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BANGUNJIWO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa nilai rata-rata kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) masyarakat terhadap jasa pengelolaan sampah jika bahaya kerusakan lingkungan diketahui masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh Usia terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?
5. Bagaimana pengaruh Jumlah Anggota Keluarga terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?
6. Bagaimana pengaruh Pekerjaan terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?
7. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis besarnya nilai rata-rata kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap jasa

pengelolaan sampah jika bahaya kerusakan lingkungan diketahui masyarakat

2. Untuk menganalisis pengaruh Usia masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Anggota Keluarga masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah
6. Untuk menganalisis pengaruh Pekerjaan masyarakat Desa bangunjiwo terhadap *Willingness to Pay* jasa pengelolaan sampah
7. Untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap *Willingness To Pay* jasa pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi regional yang terus berkembang terutama mengenai atau yang berkaitan dengan *willingness to pay* dalam pengelolaan sampah di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran dan sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca termasuk pemerintah Kabupaten Bantul mengenai *Willingness To Pay* pengelolaan sampah di permukiman warga, serta diharapkan penelitian ini memberikan saran atau solusi mengenai upaya dalam mengatasi pengelolaan ataupun pengangkutan sampah di permukiman warga yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul atau pihak-pihak yang terkait.